

# PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2018-2023

#### **DAFTAR ISI**

DAFTAR I	SI	i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1.Latar Belakang	1
	1.2.Landasan Hukum	4
	1.3.Maksud dan Tujuan	7
	1.4.Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat	11
	Daerah	
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	29
	Perangkat Daerah	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
	DAERAH	31
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	31
	Pelayanan Perangkat Daerah	
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	32
	Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan	
	Renstra Provinsi	
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	34
	Provinsi	
	3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
	pada RPJMD	36
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	38
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII	PENUTUP	59

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat signifikan dan menjadi dasar atau acuan dalam mendorong dan memberikan arah pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan tentang Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (i) Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah PD; dan (ii) Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan Tahunan PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Belitung berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah ;

## "Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023"

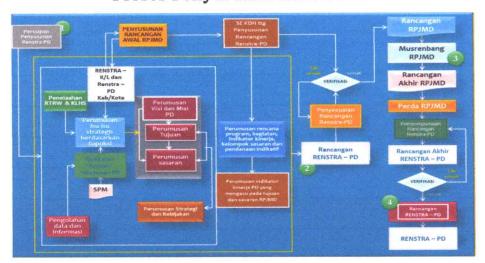
Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan PD untuk menyiapkan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Renstra PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra PD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mengatur tahapan penyusunan Renstra yang terdiri atas:

- a) Persiapan penyusunan;
- b) Penyusunan rancangan awal;
- c) Penyusunan rancangan;
- d) Pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- e) Perumusan rancangan akhir; dan
- f) Penetapan.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD



Keterkaitan antara Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD adalah sebagai berikut. Keterkaitan :

Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mempedomani RPJMD dimana RPJMD kabupaten harus memperhatikan dan diselaraskan dengan RPJMN. RPJMN merupakan Pedoman bagi K/L dalam menyusun Rensra K/L.

Renstra Perangkat daerah menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat daerah dan Renja Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Skema hubungan perencanaan dan Anggaran dapat digambarkan dibawah ini :

Visit Mini, Program
Presiden

Dijabarkan

Pedoman

RenstraKL

Pedoman

Acuan

Pedoman

RenstraKL

Pedoman

RenstraKL

Pedoman

RenstraKL

Pedoman

RenstraKL

Pedoman

RenstraRenstraDijabarkan

Diserasikan melalui Musrenbang

RenstraDijabarkan

Diserasikan melalui Musrenbang

RenstraDijabarkan

Pedoman

RenstraDijabarkan

Pedoman

RenstraSKPD

Pedoman

RenstraSKPD

Renst

Gambar 1.2

Berdasarkan gambar 1.2 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan

Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra Perangkat Daerah.

Adapun perubahan Renstra ini mengacu pada:

- Perubahan Nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 2. Perubahan RPJMD;
- 3. Penanganan Covid-19 berdampak pada perencanaan pendapatan dan belanja daerah serta perencanaan program utama dan prioritas yang sejak awal akan dilaksanakan. Ketika Covid-19 berdampak pada belanja dan pendapatan menyebabkan sangat mungkin tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga diperlukan revisi RPJMD.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- 23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
- 24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
- 25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- 26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- 27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- 28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- 29. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

#### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah: Memberikan arah dan pedoman Perangkat Daerah dan seluruh personilnya dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran PD secara berkesinambungan dan berkelanjutan dan untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang komunikasi dan informatika, urusan 7 | Perubahan Rencana Strategis Diskominfo Kab. Belitung Tahun 2018-2023

pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah, untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Dokumen Renstra PD adalah:

- Menjadi pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;
- 3. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun;
- 4. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

#### BAB II

#### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerahdan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi egovernment, intranet, layanan akses internet dan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

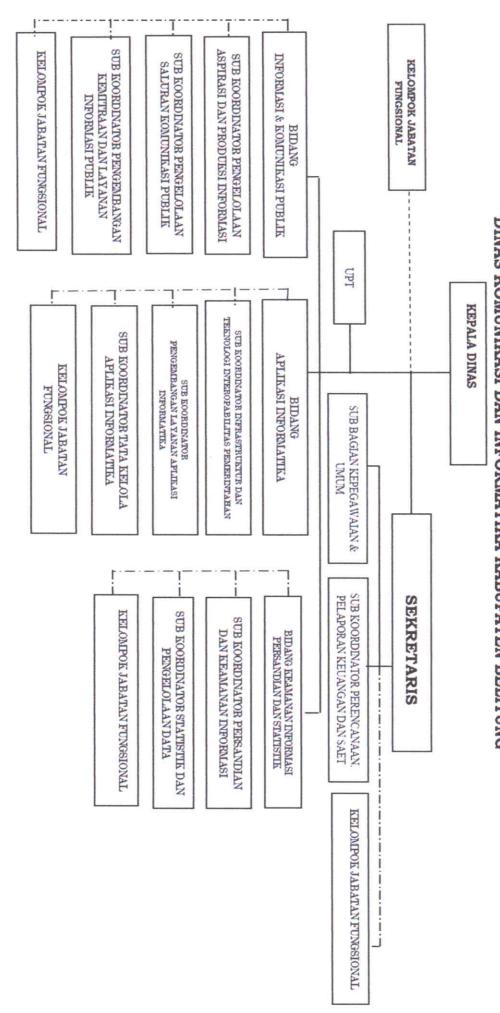
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan sebagai berikut: Peningkatan jaringan komunikasi dan keterjangkauan akses informasi berbasis teknologi. Dalam pelaksanaan Renstra tahun 2013-2018 terdapat hambatan utama yaitu Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya diserahkan.

## 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama

domain dan sub domain, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi eintranet, akses internet dan layanan layanan government, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan yang terintegrasi, integrasi layanan publik suplemen kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi langsung 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu:

#### 1. Sekretariat:

- a. Sub Koordinator Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik.

#### 3. Bidang Aplikasi Informatika

- a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Interopabilitas Pemerintahan;
- b. Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika; dan
- c. Sub Koordinator Tata Kelola Aplikasi Informatika.
- 4. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik:
  - a. Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi; dan
  - b. Sub Koordinator Statistik dan Pengelolaan Data.
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelengarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. layanan hubungan media;

- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO).

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelengarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra

- Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi pemerintah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Elektronik, Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan Government Chief Information Officer (GCIO);

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi, persandian dan statistik sektoral.

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-Government dan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- g. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- h. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

- j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten;
- k. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat keras dan perangkat lunak persandian;
- pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. penyiapan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- p. pelaksanaan dan koordinasi survei statistik sektoral bidang sosial,
   ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan statistik;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

#### a. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika pada Desember 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 33 pegawai, yang terdiri dari 19 pegawai laki-laki (57,6%) dan 14 pegawai perempuan (42,4%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 28 orang (84,9%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 5 orang (15,1%). Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1

Alokasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Unit K	erja J	umlah
1	Kepala Dinas		1
2.	Sekretariat		6

No	Unit Kerja	Jumlah
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6
4.	Bidang Aplikasi Informatika	8
5.	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan	4
	Statistik	
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	8
	Jumlah	33

Tabel 2.2

Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan
Pangkat/Golongan Tahun 2020

Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total
Gol. IV	5	-	5
Gol. III	20	-	20
Gol. II	8	-	8
Gol. I	÷		-

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3

Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan

Terakhir Tahun 2020

Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total
S-3		-	
S-2	5		5
S-1	15		15
D-IV	-		- 1
D-III	8		8
D-II	-		
D-I		-	-
SMA/Sederajat	4	-	4
SMP/Sederajat	1	-	1
SD/Sederajat			

Tabel 2.4

Rincian SDM Dinas Kominfo Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Terakhir Tahun 2020

Golongan	12.70		A Syling Syl	1	Pendidi	kan Te	rakhi	r		L soleti	
PNS/CPNS	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	DII	DI	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	5	1	<b>75-</b> 5		1-1	-	-	- 3		0.75
PNS Gol. III	-	-	14	-	3		-	2	-		-
PNS Gol. II		-	-	-	5	- 1	-	2	- 1	1	-
PNS Gol. I	-	7-	-	-	-	- 1-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	- 1	===	4-1				M-6		P Table		-
CPNS Gol. III	-	-	-		-	-	-	175	-		-
CPNS Gol. II	-	-	-		15-4	-	-			7-7	-
CPNS Gol. I	-	-	-		-	7-3	-	E 1 -	-	-	-
Jumlah	-	5	15		8	-	-	4	-	1	-

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Pim	Jumlah Pegawai
1	Diklat Pim IV	4
2	Diklat Pim III	3
3	Diklat Pim II	

Selain data pegawai di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung juga mempunyai tenaga honorer yang antara lain:

- 1. Tenaga honorer untuk Penjaga malam sebanyak 1 (satu) orang
- 2. Tenaga honorer untuk Cleaning Service sebanyak 2 (dua) orang
- 3. Tenaga honorer untuk Sopir sebanyak 1 (satu) orang
- 4. Tenaga honorer untuk TU 1 (satu) orang

#### b. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Sampai dengan 2020

No		Jenis Barang	Satuan	Jumlah Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup
I.	Alat	-alat Angkutan				
	1.	Mobil	Unit	2	5	Kurang
	2.	Motor	Unit	12	14	Cukup
II.	Alat	Ukur				
	1.	GPS	Unit	1	3	Kurang
	2.	Alat Pengukur Suhu	Unit	2		Cukup
III.	Alat	-alat Kantor/				1
	Run	nah Tangga				
	1.	Mesin Tik	Buah	2	2	Cukup
	2.	Filling Cabinet	Buah	12	20	Kurang
	3.	Brancash	Buah	1	2	Cukup
	4.	Lemari Buku	Buah	12	12	Cukup
	5.	Lemari Arsip	Buah	-	9	Kurang
	6.	Kursi Kerja	Buah	48	50	Cukup
	7.	Meja Kerja	Buah	25	30	Cukup
	8.	Kursi Rapat	Buah	57	200	Kurang
	9.	Meja Komputer	Buah	47	25	Cukup
	10.	Komputer	Unit	13	15	Cukup
	11.	Printer	Unit	35	15	Cukup
	12.	Laptop	Unit	23	16	Cukup
	13.	AC Split/Dinding	Unit	30	25	Cukup
	14.	AC Tower	Unit	1	6	Kurang
	15.	Sound System	Set	1	5	Kurang
	16.	Kursi Tamu	Set	4	7	Kurang
	17.	Kipas Angin	Unit	5	8	Cukup
	18.	Server/Mainframe	Unit	9	10	Kurang
	19.	Jaringan LAN	Set	-	5	Kurang
	20.	Meja Rapat	Set	20	3	Cukup

No		Jenis Barang	Satuan	Jumlah Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup
	21.	Mesin Potong Rumput	Unit	-	2	Kurang
	22.	CCTV	Set	3	3	Cukup
v.	Alat-alat Studio dan Komunikasi					
	1.	PABX	Unit		2	Kurang
	2.	Pesawat Faximile	Unit	3	2	Cukup
	3.	Pesawat Telepon	Unit	1	8	Cukup
	4	Pesawat Telepon Satelit	Unit		1	Kurang
	5	Handy Talky	Unit	7	12	Kurang
	6	Proyektor + Layar	Unit	2	5	Kurang
	7	Kamera	Unit	10	6	Cukup
	8	Handy Cam	Unit	2	2	Cukup
	9	Video Camera	Unit	3	2	Cukup
	10	Drone	Unit	2	2	Cukup
	11	Alat Pemadam Kebakaran (APAR) Ringan	Buah	3	5	Cukup

Sumber: Buku Inventaris 2020, diolah (jumlah barang dalam kondisi baik)

#### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2014-2018 Tabel 2.7.1

No		Н													2			ω	
Indikator Kineria		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi	b. Media baru seperti Website (media online)	(media Luar Ruangan seperti	Buletin, Leaflet, Brosur, Spanduk	dan Baliho		d. Media Interpersonal seperti	sarasehan, ceramah/diskusi dan	lokakarya		e. Media tradisional seperti	pertunjukan rakyat	Cakupan pengembangan Kelompok	Informasi Masyarakat di Tingkat	Kecamatan	Ketersediaan Data Pembangunan	Daerah yang akuntabel
-	NSPK		12 kali/ta hun	Setiap hari	12	kali/ta	hun	12	kali/ta	hun/	kecam	atan	12 kali/ta	hun		50%			
Target	IKK	100%		1												100%		200%	00/0
Target Indikator	Lainnya																		
	2014																		
Target Renstra	2015 2016																		
nstra	2017 2018	100% 100%						el nee		4364						100% 100%		100% 100%	TOO.00
		100%							al fa							100%		1000%	TOO / 0
	2014																		
Res	2015																		
Realisasi Capaian	2016																		
apaian	2017	90.03%														40.05%			
	2018	81.99%														95.25%		67 040%	01.01.0
	2014																	A CONTRACTOR	
Rasio	2015																		
Rasio Pencapaian	2016																		
paian	2017	0.9														0.4			
	2018	0.82														0.95		0 68	0.00

Selama Tahun 2017-2018 pelaksanaan Diseminasi baru dapat dilaksanakan melalui website, bulletin, leaflet dan spanduk. Sedangkan kelompok, untuk ketersediaan data Pembangunan Daerah yang akuntabel pencapaiannya belum dapat maksimal dikarenakan masih kurangnya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses. media interpersonal dan media tradisional belum dapat dilaksanakan. Kelompok Informasi Masyarakat saat ini sudah terbentuk 6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 Tabel 2.7.2

									2		_		No
f. Pemanfaatan data	dengan menggunakan instrumen	kontrol pengamanan informasi	e. Agregat nilai pelaksanaan	d. Layanan Persandian	c. Pengaduan masyarakat	b. Diseminasi informasi	a. Terintegrasinya sistem informasi	dan informatika yang berkualitas	Persentase Pelayanan komunikasi	(SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		Indikator Kinerja
												NSPK	Target
												IKK	Target Target
												Lainnya	Target Indikator
							I I	04,01/0	62 51% 65% 75% 90% 95% 81 72	02,31% 03%	00 710/	2019	
								00/0	67%	00%	070/	2019 2020 2021 2022 2023 2019	Targe
								2	75%	/3%		2021	Target Renstra
								2	90%	90%	200/	2022	tra
								70/0	95%	93%	0,0	2023	
								01,72	81 73	,		Marie Marie	
								00,02	86 62	01,09	01 00	2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023	Realis
												2021	Realisasi Capaian
												2022	aian
												2023	
								1,0	<u>۔</u> س			2019	
								1,0	<u>ــ</u> س	1,20	1 06	2020	Rasio
												2021	Rasio Pencapaian
												2022	paian
												2023	

Untuk indikator *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat* tahun 2019 belum dilakukan survey di karenakan tahun 2019 masih merupakan tahun pertama dari pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah 2018-2023. Sedangkan untuk indikator *Presentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas* realisasi capaian kinerja tahun 2019 adalah *81,72%*.

Ketercapaian indikator kinerja tahun 2020 dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator *Nilai Survey Kepuasan Masyarakat* dari target yang ditetapkan sebesar 65% capaian kinerjanya sebesar 81,59%, diperoleh dari hasil survey melalui kuisioner ke masyarakat. Sedangkan untuk indikator *Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas* dari target yang ditetapkan sebesar 65% capaian kinerjanya sebesar 86,62%, pencapaian ini diperoleh dari formulasi hitungan komponen IKU dengan perumusan capaian bobot dari 30% Terintegrasinya Sistem Informasi, 30% Diseminasi Informasi, 5% Pengaduan Masyarakat, 10% Layanan Persandian, 10% Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan 15% Persentase Pemanfaatan Data.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

9	8 7	6	5	4	w	2	_		INO	2
Urusan Program	7 Program 8 Program	6 Program	5 Program	Program	3 Program	2 Program		Urusan		
Urusan Statistik  9 Program Pengembangan  Data/Informasi/Statistik Daerah	7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 8 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Komunikasi dan Informatika	Clataii	I realization
									2014	
									2015 2016	Anggar
									2016	an Tahu
50,550	555,830 166,250	91,480				129,032	538,848		2017	Anggaran Tahun 2013-2018
72,500	555,830 1,779,835 166,250 42,170		10,000	240,000	12,500	588,692	611,675		2018	18
									2014	R
									2014 2015 2016	ealisasi
									2016	Anggar
ı	500,436.65 66,582.62	55,031.20				70,972.07	402,952.48		2017	Realis asi Anggaran Tahun 2013-2018
49,258.65	1,459,288.52 40,166.10		7,	154,427.69	12,	487,324.43	513,735.79		2018	13-2018
3.65	8.52		7,974	7.69	12,000	1.43	5.79			
									14 20	asio ani
								_	15 201	tara rea
0.005	0.90%	0.60%				0.55%	0.75%		2014 2015 2016 2017	lisasi da
0.00% 0.68%	% 0.81% % 0.95%	%	0.79%	0.64%	0.96%	% 0.83%	% 0.83%		7 2018	Rasio antara realisasi dan anggaran
				<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>		1			Anggaran	100
									Realisasi	Rata-rata Pertumbuhar

50% dikarenakan harga pasar cetak Buletin pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah melalui Media Cetak sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan Tim PPID mengalami perubahan. Pada Tahun 2017 rasio Program Kerjasama Informasi dibawah dalam program ini terdapat kegiatan Penguatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang mana tupoksi PPID belum berjalan melebihi plafon anggaran sehingga honor tim pendukung tidak dapat direalisasikan. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika memiliki rasio 0.60% pada tahun 2017 dikarenakan oleh di

Tabel 2.9

Perubahan Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

NO. SASARAN ST	ATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA  3 Rlayanan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
1 Terwujudnya komunikasi d informatika y berkualitas	ya pelayanan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
nublik berbasi	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi) + (35% x diseminasi informasi) + (10% x persentase Pelayanan komunikasi dan tingkat kematangan keamanan informasi) + (20% x persentase pemanfaatan data)  Keterangan:  1. Terintegrasinya sistem informasi + (20% x persentase pemanfaatan data)  Keterangan:  2. Diseminasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE) x 100% diseminasi yang dimiliki) x 100%  3. Tingkat kematangan keamanan informasi + (20% x persentase pemanfaatan data)  Henanfaatan data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daera

# 2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dibentuk dalam rangka komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung. Dalam perkembangannya terdapat tantangan dan peluang yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika.

Tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan komunikasi dan informatika muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2. Setiap Orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau
- d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan peluang dan tantangan pelayanan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

#### · Tantangan:

- 1. Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Pemerataan Infrastruktur TIK
- 3. Ketersediaan Satu Data
- 4. Keamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah
- 5. Aparatur dan masyarakat yang melek terhadap TIK

#### Peluang:

- 1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- 2. Kebijakan Nasional tentang TIK
- Belitung sebagai Kawasan Strategis Nasional (UGG, Kawasan KEK, KPPN dan KSPN)
- 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- 5. Pesatnya perkembangan TIK

#### BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya pelayanan masih menemui beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPBE.
- b. Belum optimalnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- c. Belum optimalnya Layanan Satu Data.

Tabel 3.1

Pokok masalah	Masalah	Akar masalah
Belum optimalnya	Belum Optimalnya	Belum tersedia
Layanan Sistem	Penyelenggaraan SPBE	infrastruktur TIK yang
Pemerintahan		memadai
Berbasis Elektronik,		
nformasi dan		
Komunikasi Publik,		
Persandian dan		
Statistik Sektoral		
		Belum terintegrasinya
		Sistem Berbasis
		Elektronik
		Pengelolaan Keamanan
		Informasi belum optimal
	The state of the s	Belum optimalnya
		Kompetensi SDM di
		bidang Teknologi
		Informasi
	Belum Optimalnya	Penyelenggaraan
	Penyelenggaraan	Keterbukaan Informasi
	Informasi dan	Publik masih kurang
	Komunikasi Publik	efektif

	Diseminasi informasi
	publik belum optimal
	Belum optimalnya
Aller Commence States	Kompetensi SDM di
	bidang informasi dan
	komunikasi publik
Belum optimalnya	Belum Optimalnya
Layanan Satu Data	kinerja produsen data
	dan ketersediaan data
	yang akurat
	Belum optimalnya
	Kompetensi SDM di
	bidang Statistik
	Belum optimalnya tata
	kelola bidang TIK,
	Persandian dan Statistik
	Sektoral

# 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan kondisi Kabupaten Belitung saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung periode 2005-2025. Maka visi pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah:

# "Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023"

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;

- b. Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung pada masa yang akan datang akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mendistribusikan informasi program-program pembangunan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa serta membangun akses komunikasi online yang terintegrasi dan mudah diakses
- 2. Menyiapkan jaringan infrastruktur yang memadai di bidang TIK.
- 3. Melakukan pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya TIK.
- 4. Melakukan pengembangan aplikasi inovatif yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Belitung Periode 2018-2023 yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan;
- Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan;
- 3. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung turut serta mendukung melalui misi Kedua dengan meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan yang bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor

dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Tabel 3.2

Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Belitung

Tahun 2018-2023

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
1.	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Terciptanya birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas

#### 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020—2024, mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020—2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 9 misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga; dan
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda prioritas yang dituangkan kedalam RPJMN Tahun 2020—2024.

Dari tujuh agenda prioritas nasional tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan mendukung pencapaian target dua prioritas nasional. Dua prioritas nasional tersebut adalah PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

PN-5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

PN-7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirumuskan sebagai berikut: "Babel Sejahtera Provinsi Maju Yang Unggul dibidang Inovasi, Agropolitan, dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat dan Berbasis Teknologi".

Dalam rangka mencapai visi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2007-2012 adalah sebagai berikut :

- 1. Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
- 2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas derah yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
- 4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

- 5. Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi;
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung akan mengoptimalkan layanan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, Persandian dan Statistik Sektoral, dalam rangka mendukung visi misi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

# 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2024 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam rangka memberikan dan meningkatan pelayanan sektor komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah serta mempertimbangkan dampak pembangunan dan pengembangan terhadap lingkungan hidup. Dan pembangunan dan pengembangan sektor komunikasi dan informatika diupayakan agar tetap ramah lingkungan.

Pemanfaatan jaringan optik secara optimal merupakan perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi melalui pemanfaatan jaringan optik secara optimal, secara geografis wilayah Kabupaten Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional. Pembangunan serat optik yang menghubungkan sarana prasarana pemerintahan dengan kawasan strategis lainnya memperhatikan kaidah dan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.

#### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis merupakan bagian yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi kondisi yang akan berdampak kedepannya. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Analisa yang digunakan melalui metode coding dari berbagai aspek yaitu Infrastruktur TIK (SPBE), Diseminasi Infomasi, Data Statistik Sektoral, Persandian dan Sumber Daya Manusia yang sudah diolah dan dikomunikasikan melalui rapat internal Dinas Komunikasi dan Informatika serta dikoordinasikan dalam *Forum Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika untuk 5 tahun kedepan adalah :

- Pengembangan dan penguatan tata kelola, infrastruktur dan integrasi Teknologi Informatika.
- 2. Optimalisasi pelaksanaan diseminasi informasi.
- 3. Pengembangan Manajemen data statistik sektoral.
- 4. Pengembangan keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi.
- 5. Pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Diskominfo yang sesuai kompetensinya.

#### BAB IV

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan di atas dan untuk keberhasilan mencapai visi dan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan. Hubungan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun mendatang adalah *Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas*. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah *Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK*.

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Belitung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARG	ET KINERJ	A SASARA	N PADA	TAHUN
			SASARAN/			KE-		
			TUJUAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi		Nilai Survey kepuasan masyarakat		3,26	3,24	3,6	3,8
	dan Informatika yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	81,72%	86,62%	94,85%	90%	95%

#### BAB V

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Kabupaten Belitun	g Tahun 2023	n, berdaya saing dan inovatif di
MISI	:	Meningkatkan pela akuntabel dan tran		ng bersih, inovatif, profesional
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudi Pelayanan Pelayanan Komunika Informatil berkualita	i i asi dan ka yang			
		Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK	Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik	Menyelenggarakan Diseminasi Informasi Publik
				Penguatan PPID
				Penguatan kemitraan dan Komunikasi Sosial
				Meningkatkan Kompetensi SDM dibidang informasi dan komunikasi publik
	17 (A) (B)			Meyusun dan menyiapkan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi
				Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang informasi dan komunikasi
			Mengoptimalkan Penyelenggaraan TIK	Membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi
				Meningkatkan Kompetensi SDM dibidang TIK
				Meyusun dan menyiapkan kebijakan dibidang TIK
			Manage 1	Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang TIK
			Mengoptimalkan Belitung Satu Data	Menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses
				Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang statistik sektoral
				Meyusun dan menyiapkan kebijakan dibidang statistik sektoral
				Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang statistik sektoral

#### BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan rencana kegiatan serta pendanaan yang dituangkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta dan misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Tabel 6.1 a Rencana Program, Keglatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Belitung

																		Informatika yang berkualitas	Terw ujudnya Pelayanan Komunikasi dan	1		Tujuan	
												*************						Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK		2		Sasaran	
							1 02 10										1 02 10			4		Kode	
Sosialisasi layanan publik berbasis elektron ik	Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi	Pemeliharaan jaringan, server dan aplikasi 5. Government	Rembangunan Network Operation Center (NOC)	Penyusunan DED Command Center	Layanan infrastruktur dasar data center Dsaster recovery center dan TiK	Ke giatan : Penyelenggaraan Bosistem TK dan Kerjasama Smart City	02 Pengelolaan Aplikasi informatika	Penguatan PPID	Pengelolaan LA PORI SP4N	Pengelolaan LFPL Radio Suara Praja	Pengadaan Apikasi Pelayanan Masyarakat	Pengadaan Jasa Sew a internet/Bendw idth	Rencans Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab Belitung	Pengelolaan Media Center	Pemeliharaan jaringan, server dan aplikasi E. Government	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengelolaan Wabsite	01 Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa			O1		Program dan Keglatan	
Peserta sosialisasi	Apiikasi Pelayanan Masyarakat	Jaringan,server dan aplikasi Б Government	Network Operation Center (NOC)	Dokumen DED Command Center	Jaringan, server dan aplikasi e- Government	Bosistem TK dan apilkasi Smart Island	Persentas Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Terkelolanya PPID	Terkelolanya LAPORI SP4N	Siaran Radio	Tersedianya aplikasi pelayanan masyarakat	Tersedianya Koneksi Internet eGovernment dan publik	Tersedianya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Media Center	Terpelharanya jaringan, server dan aplikasi E-Government	Terpelharanya w ebsite	Kelancaran Diseminasi informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	Survey kepuasan masyarakat dibidang teknologi informasi	O.		Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
25%	25%	100%	9%	0%	40%	50%	25%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%			7	SHOW IN	tahun awal perenc	Data capalan
				100%	40%	90%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,51%	62,51%	œ	Target	Tahu	
				50,000	1,113,675	133,500	1,297,175	22,000	146,755	282,565	35,000	792,300	314,747	73,220	165,300	25,800	1,857,687			9	RP(000)	Tahun 2019	
100 org	2 aplikasi 100%	100%	1 unit		5 jenis	2 jenis	65%	Wilder of the last				N. A. S.		15.18				65%	65%	10	Target	Tat	
108,980	36,080	200,000	2,000,000		2,320,000	3,500,000	9,451,650													11	RP(000)	Tahun 2020	
																				12 13	:t RP(000)	Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
																				14 15	t RP(000)	Tahun 2022	am dan Kerangka naan
																				16 17	Target RP(000)	Tahun 2023	
100 org	2 aplikasi 100%	100%	1 unit	100%	5 jenis	2 jenis	65%	100%	100%	100%	1 aplikasi	100%	90%	90%	90%	100%		65%	65%	18	Target	Kondis akhir pe	
108,980		200,000 E	2,000,000 Bld.e-Gov	50,000	3,433,675 Bld.e-Gov	3,633,500 E	10,748,825	U	146,755 E	282,565 Bld. KP	35,000 E	792,300 Bld.e-Gov	314,747 Bid.e-Gov	73,220 Bid.IKP	165,300 Bid.e-Gov	25,800 Bid.IKP	1,857,687			19	9	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
Bid.e-Gov		Bid.e-Gov		Bid.e-Gov		Bld.e-Gov		Bid. KP	Bid. KP	Sid. IKP	Bid. KP			Sid. IKG		Sid. IKP				20		OPD Penangg ungjawab	Jnit Kerja
th Xeo	5 X	51 X 8	Tg Pandan	Tg.Pandan	o Kac	S Xec.		Tg.Pandan	Tg.Pandan	Tg. Pandan	Tg.Pandan	5 Kec	5 Kec	Tg.Pandan	o Kec.	Tg.Pandan				21		Lokasi	

																		-							
	1 02 14			_	-						_			_				_			1 02 10				
Kegiatan :	01 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pengelolaan konten dan perencanaan	Pelayanan informasi publik	Kemtraan dengan pemangku kepentingan	Pengelolaan media komunikasi publik	Layanan hubungan media	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Pameran/EXPO Kominfo	Pengelolaan Radio Lembaga Penylaran Publik Lokal (LPPL)	Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok hiformasi Masyarakat	Diseminasi Informasi Media Tradisional	Pengelolaan Layanan Informasi Online	Rengelolaan Media Center	Pengelolaan PPID	Analisa Informasi dan Komunikasi Publik	Pembentukan dan Pembinaan Kampung Radio	Kegiatan : Pembuatan Buletin		Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat		03 Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik	Layanan Alsaes Internet, Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pelathan SDM Bidang Telmologi Informasi dan komunikasi	Monitoring evaluasi pelaporan penyelenggaraan e-government	Layanan w ebaite fembaga pelayanan publik (Velasate fembaga pelayanan publik dan dan kegiatan pemerintah daerah Pemerintah Daerah
	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Media komunikasi publik berfungsi balk	Terkeblanya layanan informasi publik	Terjalinnya kemitraan pemangku kepentingan	Terkelolanya media komunikasi publik	Jumlah yang terlayani hubungan media	Laporan monitoring agenda prioritas	Pameran/EXPO Kominfo	Radio LPPL Berfungsi Balk	Kelompok Informasi Masyarakat	Daeminasi informasi melalui media tradisional	Portal media online berfungsi baik	Media Center Berfungsi Baik	Terkelolanya PPID	Laporan analisa informasi	Kampung Radio	Disemnasi Informasi	Persentase Diseminasi Informasi kebijaksan yang didesiminasikan	Layanan Pengaduan Masyarakat berfungsi baik	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Terlayani		Konetsi internet e-Government dan publik	Juntah Alparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelathan Perangkat Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Website lembaga,pelayanan publik dan Pemerintah Daerah
	70%							100%	100%									40%		Belum		80%	25%	25%	50%
	75%					長夢	No. of the last	1							No. of Parties	SECTION OF		40%	Section 1						
	107,000		THE PERSON NAMED IN					296, 520				The state of the s	Section 1					296,520			296,520				
				San San				Ē	100%	0 KIM	<u>F</u>	100%	100%	100%	1 dok	1 kampg	6 edisi	60%	100%	90%		100%	200 OK	1 dok	100%
								300,000	329,856	57,890	78,240	39,000	150,245	65,600	36,500	80,765	110,900	1,228,796	54,000	54,000	1,282,796	875,000	365,160	14,000	32,430
											12 12 12 13														
	20%							ě	100%	MIN 9	0	100%	100%	100%	1 dok	1 kampg	6 edis	60%	100%	90%		100%	200 OK 100%	1 dok	100%
	107,000							300,000	329,856	57,690 Bid IKP	78,240 Bid: KP	39,000 Bld.lKP	150,245 Bld IKP	65.600 Bld.IKP	36,500 Bid.IKP	60,765 Bld.IKP	110,900 Bid.KP	1,525,316	54,000 Bid.IKP	54,000	1,579,316	875,000 Bid.e-Gov	365,160 Bid.e-Gov	14,000 Bid.e-Gov	32,430 Bid.e-Gov 5 Kec
										Kec Selat	Kec Badau, Kec Mbi	Tg. Pandan	Tg.Pandan	Tg. Pandan	Tg. Pandan	5 Kec	Tg. Pandan		Tg.Pandan			o Xeo	v Tg.pandan	O Keo	Us Xee

																				_
								k									-	-		
									1 02			1 0						- 1		_
ם א	חד כד	7.7	5.71	X 2	0.77.7		7. 7		6		77.	02 10 04						02 14 02		=
Pengadaan sarana dan prasarana keamanan informasi	Pengamanan Sistem Bektronik dan pengamanan Informasi nonelektronik	Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi	Peningkatan Pemahaman keamanan Informasi pemerintah daerah dan publik	Monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi	Ke glatan : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dibidang keamanan informasi		Keglatan Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi		Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi	Kogiatan : Pengenbangan Sistem Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah	Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Montoring Evaluasi dan Pelaporan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Penyusunan Buku Statistik Sektoral	Pengelolaan Belitung Satu Data	Kegiatan:	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Forum Data	Pengelolaan Portal Belitung Satu Data
rena dan p	Sistem Elei Informasi no	kebijakan Pe	emahaman erintah dae	aluasi dan p ormasi	apasitas ap		aring Komu		araan Pen merintah	sadaran K	In Sistem P	nyelengga anan Info	aluasi dan f	Gapasitas K oral	Buku Statisi	Beltung Sat		nyelengg:	aan Forum	Portal Belitu
rasarana	ktronik dar onelektronik	engamanan	keamanan rah dan pu	xelaporan d	paratur pen an informas		nikasi Sand		garnanan Daerah	eamanan in	engelolaan tiik Pemerin	araan Pere rmasi	Pelaporan S	Jelembagaa	tik Sektoral	Deta		araan Stat	Data	ng Satu Da
8 d						3 H		5 0 3		_						0			וד	
Tersedianya sarana dan prasarana keamanan informasi	Jumlah sistem elektronik dan non elektronik yang diamankan	Peserta Sosialisasi	Peserta Sosialisasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keamanan Informasi	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengukuran Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Jaring Komunikasi Sandi Daerah	Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi		Terlaksananya sosialisasi Kesadaran Keamanan informasi	Tersedianya peralatan untuk pengeolaan Security Operation Center (SOC)	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Peserta Bimtek/w orkshop	Buku Statistik Sektoral	Belitung Satu Data		Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Forum Data	Terkelolanya Data Pembangunan Daera)
sarana dan ormasi	n elektronik ng diamanka	ilsasi	alisasi	toring dan anan Inforn	anya Bimbi Geamanan I	natangan	ikasi Sandi	layanan p dar keam		/a sosialisa	peralatan u Security Op	OPD yang can layana	itoring dan	ek/w orksho	Sektoral	Data		Pernanfa erah		Data Pemb
prasarana	dan non			Evaluasi di Vasi	ngan Teknit nformasi	Keamanan	Daerah	ersandiar anan		si Kesadari	ntuk veration Cer	n persanc	Evaluasi	ŏ				atan Data		angunan D
		40%	40%	40%	40%	= Le ve	50%	60%		an 60 orang	2 unit	20%	100%	100%	100%	100%		Beium	100%	aera) 100%
					50 orang	Level II		% 60%	1	ng 60 orang	2 unit	30%	8	3	9%	0%		ia	3 14	1 Dok
			10		26,740	26,740 Level III			26,740	26,740	85,000	111,740					-		25,000	82,000
			100 org	1 dok		- I	8 CD (8	70%					1 dok	40 org	1 dok	dok		70%	體層	
			36,000	15,000		51,000	75,500	75,500	126,500				18,000	60,000	159,400	107,540		344,940		
				A V																
			10			-	9			8	2.									
			100 org	1 dok	90%	Level III	9 unit	70%		60 orang	2 4 1		1 dok	40 org	1 dok	1 dok		70%	1 kgali	D
			36,000	15,000		77,740	75,500	75,500	153,240	26.740	85,000		18,00	60,00	159,40	107.54		344,940	25,000	82,000
Bid.KIPS	Bid. KIPS	Bid. KIPS	36,000 Bid.KIPS	15,000 Bid KIPS	Bid KIPS	ō	75,500 Bid.KIPS	5	Ŭ	Bd.KPS	85,000 Bd.KIPS		18,000 Bld. KPS	60,000 Bld. KIPS	159,400 Bid. KIPS	107,540 Bid. KIPS		ő	25,000 Bid. KIPS	82,000 Bid. KIPS
Tg. Pandan	Tg. Pandan	Tg. Pandan	Tg. Pandan	5 Kec.	Tg.Pandan		Tg. Pandan			Tg.Pandan	Tg. Pandan		5 Kee	Tg. Pandan	th Kec.	Tg. Pandan			Tg. Pandan	Tg.Pandan
5	an	an n	in the second		9		à			85	ian .			a a		in the second			a5	100

		-										ı											Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran	
2 10 01									2 10 01													2 10 01 01		
05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembangunan Tempat Parkir	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peweliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ke giatan :	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kesejahteraan Pegaw ai Non PNS	Penyediaan Spanduk/Umbui-umbul dan Bendera	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Komponen Instalasi Listriid Penerangan Bangunan Kantor	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ke giatan :	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penyediaan layanan Keamanan informasi.
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tempat parkir	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Perlengkapan gedung kator dalam kondisi balk	Kendaraan dinas/operasional dalam kondal balk	Gedung Kantor dalam kondisi baik	Peralatan Gedung Kantor	Ferlengkapan gedung kantor		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kesejahteraan Pegaw ai non FNS	Tersedianya spanduk/umbul-umbul dan bendera	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Makanan dan minuman	Bahan Bacaaan	Komponen instlasi listrilopenerangan bangunan kantor	Barang cetakan dan penggandaan	Alat Tulis Kantor	Jasa komunikasi, sumber daya air dan Jistrik	Jasa surat menyurat		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pernenuhan Kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah layanan keamanan informasi
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	7,
100%	100%	100%	100%	100%	100%		80%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
12,500	196,783	23,400	7,700	105,792	35,000		50,000		421,675	1 ,,,	148,500	7,200	9,600	23,635		12,000	34,000	36,000	114,000	1,200		646,815		
100%		100%	100%	100%	100%	5 jenis/ 12 unit	2jenis/		100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
52,250		23,400	10,000	75,000	35,000	118,500	52,120		314,020	210,000	148,500		10,000	30,000	12,000	12,000	30,000	40,000	132,600	1,200		626,300		
						5	2																10	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	5 jenis/ 12 unit	jenis/	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	-
64,750	199,783 Sekretariat Tg.F	46,800 Sekretariat Tg.F	17,700 Sekretariat Tg.F	180,792 Sekretariat Tg.F	70,000 Sekretariat Tg.F	118,500 Sekretariat Tg.F	102,120 Sekretariat Tg.F		735,695	460,000 Sekretarlat Luar Daerah	297,000 Sekretariat Tg.F	7,200 Seldetariat Tg.F	19,600 Sekretariat Tg.Pandan	53,635 Sekretariat Tg. Pandan	22.680 Sekretariat Tg.P	24,000 Selvretariat Tg.P	64,000 Sekretariat Tg. Pandan	76,000 Sekretariat Tg.Pandan	246,600 Sekretariat Tg.I	2,400 Sekretariat Tg.P		1,273,115		BIGIKIPS Tg.P
	Tg.Pandan	Tg.Pandan	Tg.Pandan	Tg.Pandan	Tg Pandan	Tg.Pandan	Tg.Pandan			rah	Tg.Pandan	Tg.Pandan	andan	andan	Tg.Pandan	Tg. Pandan	andan	andan	Tg Pandan	Tg.Pandan				Tg. Pandan

Н															
H															
JUMLAH	Promosi Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Panyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<b>Ke glatan :</b> Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Dokumen keuangan Perangkat Daerah Daerah	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan,Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	Pendidikan dan Pelathan Sumberdaya Aparatur	Ke giatan :	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Apartur Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan Mesin Absensi
	Promosi pembangunan daerah	Dokumen pelaporan Perangkat Daerah	Dokurren perencanaan Perangkat Daera	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat Kompetensinya sesuai perencanaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Presentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Mesin absensi
Ц	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
						100% 4 Dokume	100%				5 orang	100%		25 stel	
4,957,852						10,000	10,000				170,000	170,000		12,500	
	2 kali	2 Dok	2 Dok	4 Dok	100%			100%		100%			100%	100%	100%
12,393,956	60,000	3,000	2,500	5,000	70,500			125,000		125,000			29,750	17,500	5,000
	2 kall	2 Dok	2 Dok	4 Dok	100%			100%		100%	5 orang	100%	100%	100%	100%
17,351,808	60,0				70,500	10,00	10,000	125,0		125,000		170,000	29,7:		
8	60,000 Sekretariat Tg.Pandan	3,000 Sekretariat Tg.Pandan	2,500 Sekretariat	5,000 Sekretariat Tg.Pandan	00	10,000 Sekretariat Tg.Pandan	- 0	125,000 Sekretariat Tg.Pandan		00	170,000 Sekretariat Tg.Pandan	8	29,750 Sekretariat Tg.Pandan	30,000 Sekretariat Tg.Pandan	5,000 Sekretariat Tg Pandan
	at Tg.Panc	at Tg.Panc	at Tg.Pandan	t Tg.Panc		at Tg.Pand		at Tg.Panc			at Tg.Pano		at Tg.Pano	at Tg.Panc	t Tg.Pand
	lan	lan	lan	an		an an		lan			lan		an	95	9

																				Informatika yang berkusiitas	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan	(3)	Tujuan		
						ı				1									Berbasis TIK	Meningkatnya		(2)	Sasaran		
	2 16 01 2.01 04		2 16 01 2.01 03		2 16 01 2.01 02			2 16 01 2.01 01				2 16 01 2.01						2 16 01	1			(3)	Kode		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan :			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						PROGRAM : PENUNJAKU URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEWKOTA			- 1	(4)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Rencana Program, Ke
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	D Dokumen DPA-SKPD	Jumiah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumiah Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	Hasil : Ternenuhirva Dokumen	Keluaran : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan	Perencanaan Penganggaran, Evatuasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	B	4.Persentase Pemenuhan Sarana	3.Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	_	Persentase Pelayanan Komunikasi	Survey kepuasan masyarakat dibidang teknologi informasi	(5)	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)		Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
n/a	n/a	n/e	n/a	nza	n/a	Dok	ω	Dok 2			7.								%	86.62	3.26	(6)	pada Tahun Awal Perencanaa	Data	
								Dok 3		%	Dok	o	% 6	8 8	100	100 %	75 %	% %	%	94.85	3.24	(11)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE PARTY OF THE P	asaran dan elitung
								2,500,000				5,500,000						5,633,608,743				(12)	2021		Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Belitung
Dok -		Dok 1		Dok		Dok	ω			% ;	Dok	10	% 6	8	100	% %	% 75	% %	%	90	3.6	(13)		Target K	at#
2,000,000		2,000,000		2,000,000			2,000,000					12,000,000						6,034,424,835		3		(14)	2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
Dok -		D <sub>x</sub>		Dok		Dok	ω			%	Dok 100	to	% 6	8	<sup>8</sup> 100	% %	%	% 00	%	95	3.8	(15)	-	lan Kerang	
2,000,000		2,000,000		2,000,000	0000		2,000,000					12,000,000	)		1			6,075,400,000				(16)		ka Pendanaan	
Dok 2		Dok 2		Dok N	3	Dok	ō	Dok 3		%	Dok	26	% 5	8 8	, 1 <sub>00</sub>	% 100 %	% 55	% %	%	95	3.8	(17)	Kondisi Ki periode Re		
4,000,000		4,000,000		1,000	4 000 000		6,500,000					29,500,000						17,743,433,578				(18)	akhir D(s-d		
Sekretariat	Sekretariat	Sekretariat	Sekretariat	000	Sekretariat		Sekretariat	Sekretariat														(19)	SKPD Penanggun gjawab		
Tg. Pandan					Tg. Pandan		Tg. Pandan								- 16 1							(20)	Lokasi		

<b>48</b>   P e	
rubahan	
Rencana	
Strategis	
Diskominfo	
Kab.	
Belitung	
Tahun	
2018-2023	

			2 16 01 2.05 09		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		2 16 01 2.05 02 Sub Kegiatan			2 16 01 2.05 Kegiatan					2 16 01 2.02 08			2 16 01 2.02 05				2 16 01 2.02 01 Sub Kegiatan		2 16 '01 2.02 Kegiatan			2 16 01 2.01 07		
		Delicas arkan rugas dan nungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdas arkan Tunas dan Fungsi			Atribut Kelengkapannya				: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DPA-SKPD
Pendidikan dan Pelatinan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	per courses can person an	Jumlah pegawai yang mengikuti		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		PDH		Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Section Configuration Configur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100000000000000000000000000000000000000	Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai peraturan	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
Orang	7	Ą	0		n/a		n/a						Dak	4	Dok 4		n/a	n/a	Orang/Bulan	33		n/a			Dok	3	Dok	n/a	
		ę	7					%	75	34 Orang	%	75			Dok 4							14	% %	Dok 4.			Dok 4		
			75,000,000							75,000,000					4,818,400				0			4,678,016,000		4,682,834,400			3,000,000		
Orang	11			Paket	٦			%	75	33 Orang	%	75	Dok	N		Laporan	٦		Orang/Bulan	33			100 %	Dok &	Dok	ω		Dok 1	
	50,000,000				17,500,000					67,500,000				2,000,000			2,000,000			5,109,860,800				5,113,860,800		2,000,000		2,000,000	
Orang	13			Paket	_			%	75	Orang	%	75	Dok	2		Laporan			Orang/Bulan	33			100 %	Dok	Dok	3		Dok	
	50,000,000				17,500,000					67,500,000				2,000,000			2,000,000			5,110,000,000				5,114,000,000		2,000,000		2,000,000	
Orang	24	ę	7	Paket	N	Mana		%	75	0rang		75	Dok	4	Dok 4	Laporan	2		Orang/Bulan	33	Bulan	14	100 %	Dok	Dok	o	Dok	Dok	
	175,000,000				35,000,000					210,000,000				0,010,400			4,000,000				14,897,876,800			14,910,695,200		7,000,000		4,000,000	
	Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat	-	Sekretariat							Sekretariat	Sekretariat		Sekretariat	Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat				Sekretariat	Sekretanat	-	
	Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan							Tg. Pandan	Ig. Fandan	1	Tg. Pandan	Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan				Tg. Pandan	ig. Pandan	- Contangen	1

				2 16 01				2 16 01			2 16 01				2 16 01				2 16 01				2 16 01				2 16 01		-			2 16 01 2.06		
				2.06 09			- 1	2.06 06			2.06 05				2.06 04				2.06 03				2.06 02				2.06 01 Sub Kegiatan					2.06 Kegiatan		
				Penyelenggaraan Kapat Koordinasi dan Kapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	an : Penyediaan Komponen Instalasi					: Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Terpenuhinya		
dan Prasarana Aparatur	4.Persentase Pemenuhan Sarana	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	konsultasi	yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perundang-undangan	Bahan bacaan dan Peraturan	Penggandaan yang Disediakan	lumlah Daket Barang Catakan dan	Barang Cetakan dan Penggandaan	yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Peralatan Rumah Tangga	Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan	4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi	Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	The state of the s	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya	Perangkat Daerah	3.Persentase Pelayanan
			n/a	% 00		n/a	%	100	i	n/a	% 100		n/a	%	100		n/a	%	100		n/a	*	100		n/a	%	100							
%	100			% 00			%	100			100			%	100			%	100			%	100			%	100	8	100		%	100	%	100
1				175,722,058				9,000,000			30,000,000				51,503,775				10,000,000			1	51,181,120				12,000,000					339,406,963		
%	100	Laporan	12		DOX	2 -			Paket			Paket	2			Paket	-			Paket	2			Paket	-3			ð	100		%	100	*	100
			162,500,000			10,000,000			6	30,000,000			53,602,835				10,000,000				44,981,200				10,000,000							321,084,035		
%	100	Laporan	12		DOX	2 -			Paket			Paket	2			Paket	_			Paket	_			Paket	_			76	100		%	100	%	100
			182,500,000			10,000,000				30 000 000			53,700,000				10,000,000				45,000,000				10,000,000							341,200,000		
%	100	Laporan	24	% 5	200	2 2	%	100	Paket	2	% %	Paket	4	%	100	Paket	2	*	100	Paket	ω	%	100	Paket	2	%	100	70	100		%	100	%	100
			520,722,068			20,000,000	29 000 000			90,000,000			158,806,610				30,000,000				141,162,320	111			32,000,000							1,001,690,998		
			Sekretariat	Garia	Paris in the last	Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat	Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat	_	Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat						ı	
			Tg. Pandan	Caga		Tg. Pandan		Tg. Pandan		To Pandan	Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan							

															ŀ																						
			7	<u> 1</u>										A.			7																				
	1000	48 04 308			2 16 01 2.08 01				2 16 01 2.08																								2 16 01 2.07 06				2 16 01 2.07
					oub Kegiatan				Kegiatan																								Sub Kegiatan				Kegiatan
	— Daya Air dan Listrik	Deposition land Komunikasi Cimbo			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pemerintahan Daerah	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan																							Lainnya	: Pengadaan Peralatan dan Mesin				: Pengadaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah materai	Perangkat Daerah	Hasil: Persentase Pelayanan	Layanan Administrasi Perkantoran		Perangkat Daerah	3.Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		Lainnya yang Disediakan		10. Papan Reklame		9. Mesin penghancur kertas		8, Printer		7.Scanner		6.Laptop	4	5 Mesin Pemotona Rumput	4 Meja 1/2 Biro		3. Meja 1 Biro		2.Kursi			1.Lemari Arsip	Sarana dan Frasarana Aparatur	Hasil : Persentase Pemenuhan	ah Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik
n/a	* 3	18	n/a	%	100							Unit	13																				n/a				
	Bulan	3		Lembar	120	%	100	%	100	%	100			Cill	-				,	Unit	4	Unit	4			Unit 2	(	e	Unit	U	Unit		ы	%	100	Jenis	σ
		163 460 000			1,200,000				329,660,000																								64,633,380				64,633,380
12 Laporan		Laporan	12			34	100	%	100	%	100	Unit	4																					%	100	Jenis	4
148,600,000			1,200,000						314,800,000				35,310,000																								35,310,000
12 Laporan		Laporan	12			%	100	%	100	%	100	Unit	œ		in .																			%	100	Jenis	4
150,000,000			1,200,000						316,200,000				מטטוטטוטט	2000																							50,000,000
Laporan	m	Laporan 12	20 4	Lembar	120	%	100	%	100	%	100	Unit	ū	3	-	Unit	0	Unit	0	Unit	_	Unit	_	Unit	0	C <sub>nit</sub>	Unit	0	Unit	O)	Unit		ω	%	100	Jenis	14
101,000,00	462 060 000		0	3 800 000					960,660,000													(40,040,000	140043 38/														149,943,380
		Sekretariat	Sekretanar	1	Sekretariat								ORNORMIAL	District the state of the state																			Sekretariat				
1		To Pandan	eg Tangan	4	Tg. Pandan								ig. ranuan	To Donale																			Tg. Pandan				

																						- 14										
		2 16 02 2.01	16 02				2 16 01 2.09 09				2 16 01 2.09 06						2 16 01 2.09 02	2 16 01 2.09 01				2 16 01 2.09										
		Kegiatan	PROGRAM				9				Oi .						2		Sub Keglatan			Kegiatan										
		Pengelojaan informasi dan Komunikasi (Koluaran ; Persentase Layanan Publik Pemerintah Daerah KabupatenKota Pemerintah daerah KabupatenKota	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabiiltasi Gedung			Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				and processing of the second	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Kantor
komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Hasii : Terkelolanya informasi dan	si Keluaran : Persentase Layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Presentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Lainnya yang dipelihara	Gedung Kantor dan Bangunan	yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Operasional atau Lapangan yang	operasional/lapangan roda 2/3 yang dipelihara	2. Kendaraan perorangan dinas	operasional/lapangan roda 4/lebih yang dipelihara	1.Kendaraan perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil : Persentase Pemenuhan	Keluaran : Barang Milik Daeran dalam kondisi balk	4.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		4. Tenaga Non PNS Adminitrasi		3 Tenana Non PNS Kebersihan	2. Tenaga Non PNS Penjaga Malam	and the second s
				Unit	124	*	100	Unit	63	%	100	Unit	14			%	100	n/a								n/a						%
%	100	% 90	% 80			Unit	1			Unit	63			Unit	12	Unit	2			%	100	Jenis	%00				Orang	mb.	Orang	2	Orang	Orang
		673,594,970	673,594,970				39,964,000				46,170,000						50,440,000					136,574,000										9
*	100	%	100	Unit	_			Unit	63			Unit	4							%	100	Jenis	% %	Laporan		12						
		464,843,685	464,843,685		50,000,000				47,870,000				72,000,000									000,078,601				165,000,000						
%	100	%	100	Unit	_			Unit	63									Unit		%	100	Jenis	%	Laporan		12						
		450,/15,000	450,715,000		50,000,000				50,000,000									/4,500,000	74 600 000			174,500,000				165,000,000						
%	100	% 00	100	Unit	٠	Unit	_	Unit	63	Unit	63	Unit	4	Unit	12	Unit	2	Unit		%	100	Jents	% %	Laporan		24	Orang		Orang	N (	Orang	Orang
		1,089,100,000	1,589,153,655		139,964,000 Sekretariat				144,040,000					122,440,000				74,000,000				400,244,000						495,000,000	200			
					Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat		Sekretariat				Sekretariat	Oak attack	Coloratoriat							Sekretariat						
					Tg. Pandan		Tg Pandan		Tg. Pandan		Tg. Pandan		ig. Fangan			. 9	Tg. Pandan	- Tandan	T							Tg. Pandan						104

52	
2	
Ţ	
0	
п	
9	
2	
$\Box$	
22	
$\exists$	
$   \overline{\mathcal{D}} $	
0	
$\equiv$	
0	
50	
n a	
5	
$\vec{\Box}$	
ಬ	
-	
(10 (0	
<u> </u>	
5/0	
person a	
S	
~	
10	
Ξ.	
=	
Seemen.	
0	
Z	
20	
0	
W	
0	
=	
-	
$\subseteq$	
I	
0.0	
-	
53	
$\supset$	
$\equiv$	
I	
2	
0	
_	
00	
1 (	
20	
13	
w	

		%		%		100 %		% %		Hasil: Terkelolanya Nama Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah desa di Kabupaten Belitung				
	3,437,281,720	100 3,	1,876,000,000	% 00	1,735,996,920	100 %	25,284,800	% 80		Keluaran : Persentase Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditotapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 03 2.01 Kegiatan	N	
	6,556,337,660	100 6,s	2,287,765,000	**************************************	2,090,996,420	100	2,177,576,240	% 80		Persentase terintegrasinya sistem infomasi pelayanan publik dan birokrasi	: APLIKASI INFORMATIKA	16 03 PROGRAM	2	
1	-	*		Dok		Dok		71		Pemangku Kepentingan				
Membalong, Selat Nasik Bid IKP Tg. Pandan, Sjuk	141,658,295	Jenis 2	25,000,000	-	24 867 040		00716/16	Jenis 4	n/a	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Kemitaan dengan Pemangku Kepentingan	16 02 2.01 08		
1	D 0	Layanan	La	Layanan	24,030,330	Layanan			Layanan	Jumian Layanan Hubungan Media				
Bid. IKP Tg. Pandan, Sijuk Badau, Nembalong, Selat Nasik Nasik	118,097,550	atan	-				68,267,000	Kegiatan	n/a	Jumiah kegiatan hubungan media	Layanan Hubungan Media	16 02 2.01 07	2	
	00,032,240 Bld	D <sub>ok</sub> 2	25,600,000	Dok -1	25,570,680	Dok 1			n/a	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				
		% <sup>100</sup>					17,481,560	100	100	Layanan informasi publik	Pelayanan Informasi Publik	16 02 2.01 06	2	
Bid. IKP Tg. Pandan, Sijuk Badau, Membalong, Selat Nasik	1,081,663,335 Bid	2 1,0 Dok	300,000,000	Dok -	349,614,845	Dok		**	n/a	Jumlah Dokumen Hasii Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				
	Ba	en o					432,048,490	6 Jenis	100 %	Media komunikasi publik	Pengeiolaan Media Komunikasi Publik	16 02 2.01 05	N	
Membalong, Selat Nasik	70,154,245 Bid	Dok 4	35,115,000	Dok 4		2			Dok 1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				
Bid. IKP Tg. Pandan, Sijuk Badau, Membalong, Selat Nasik	Bid	Dok					35,039,245	D <sub>k</sub> 1	Dok 1	Laporan monitoring agenda prioritas	Monibring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	16 02 2.01 03	la la	
Bid. IKP Tg. Pandan, Sijuk Badau, Membalong, Selat Nasik	108,947,990 Bid	Dok Dok	40,000,000	Dok	39,980,570	12 Dok			n/a	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				
Bid. KP Tg. Pandan, Sijuk Badau, Membalong, Selat Nasik	Bid	% 00					28,987,420	100	100	Opini dan aspirasi masyarakat yang terlayani	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16 02 2.01 02	2	

							1											
	2 16		2 16		2 18		2 16			2 16	1		2 16		22		22	1
	03 2.02 04		03 2.02 03		16 03 2.02 02		03 2.02 01			03 2.02			03 2.01 03		16 03 2.01 02		16 03 2.01 01	
								Sub Keglatan :		Kegiatan								Sub Kegiatan :
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Penataiaksanaan dan Pengawasan egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			Dokumen Perencanaan SPBE	Jumlah Dokumen Hasii Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Terkelolanya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Persentase Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung yang dikelola dengan balk	-	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Internet	Jumiah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumian Pendararan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		
	× 100	n/a	n/a	n/a	n/a	Dok	Dok					n/a	n/a	1% Dok	100 %	7/8	n/a	
	Jenis 2		%				Dok 4		% %	% 0					Dok			
	1,268,100,000		491,132,440				15,135,000			2,152,291,440					25,284,800			
Dok -	•	Unit 2		D		Dok →			%	700%	Onit	40				Domain		
()	2000	190,000,000		9,999,750		19,999,750				354,999,500		1,730,000,000				028'988'0		
Dok -	•	Unit		Dok		D <sub>ok</sub> _			100 %	700%	Onit	40		Dok		Domain		
	35	190,000,000		100,000,000		20,000,000				611,769,000		1,640,000,000		30,000,000		9,000,000		
Dok	Jenis 2	Unit	100 %	Do 20		D 20	Dok 3		%	700%	Onic	40		Dok 1	Dok 1	Domain		
	1 338 100 000		871,132,440	109,999,750		(c), (c+, ) (c)	n			3,112,000,840		3,370,000,000			55,284,800	11,390,320		
	Bid Aptika	ріс. Аряка	Bid Aptika	Bld. Aptika	-	Bid. Aptika	віс. Артіка	7				Bid. Aptika	_	Bid. Aptika	Bid. Aptika	DIG. ADURA	Від. Артка	
-	To Pandan, Sijuk, Membalong, Selat		-			Mer Mer		+			Nasik	-	-			17.00		T

		11		-			a									
	19															
	2 20 02 201 01		2 20 02 2.01	2 20 02		2 16 03 2.02 *11		2 16 03 2.02 09		2 16 03 2.02 08		2 16 03 2.02 07		2 16 03 2.02 06	-	2 16 03 2.02 05
	G	Sub Kediatan	Kegiatan	PROGRAM												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorai		: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	: PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Pengembangan dan Pengelolaan Apiliasi dan Ekosistem Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kabupaten/Kota Cerdas		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Pengembangan Apilkasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Eiektronik		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan informasi
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen statistik sektorai	Hasil : Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Keluaran : Data Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	Jumiah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sertifikasi GCIO	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterpian Smart City	Aplikasi dan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Aplikasi SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan informasi Elektronik	Data Elektronik dan informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen Audit Infrastruktur dan Apilkasi SPBE
Dok 3	Dok 2				n/a	n/a	n/a	Jenis 2	n/a	n/a	1 Aplikasi	2 Aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a
	D <sub>o</sub> ω	% 80	% 80	% 00				Jenis				1 Aplikasi				
	227,263,770		227,263,770	227,263,770				352,924,000				25,000,000				
Dok &		<b>%</b> 90	% 00	% 00					1 Layanan		Unit				Dok	
241,963,640			287,486,940	287,486,940					25,000,000		25,000,000				50,000,000	
Dok 3		90 %	% 90	% 90	Dok		Dok		1 Layanan		Cuit		31 Perangk at Daerah		Dok	
227,486,940			362,486,940	362,486,940	30,000,000		116,765,000		25,000,000		25,000,000		20,000,000		50,000,000	
Dox 6	Dox w	% 90					Dok 1	Jenis 2	Lay		Unit	Aplikasi	Perangka t Daerah	40.15	Dok	
	696,714,350		877,237,650	877,237,650	30,000,000			469 689 000	50,000,000		75,000,000		20,000,000		100,000,000	in
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			1		Bid. Aptika				-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		_	від Артка			
ig. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	-				Tg Pandan		Tg.		120	-	-	-		Me Tg		

1						=	=	- 1			11					
						ı	11									
	2 21 02 2.01 03		2 21 02 2.01 02	2 21 02 2.01 01		-	2 27 02 2.07		2 21 02		2 20 02 2.01 04		2 20 02 2.01 03	1		2 20 "02 2.01 "02
					Sub Keglatan		Kegiatan		PROGRAM					l		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Penyeenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		: PENYELENGGARAAN PERSANDIAN		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Membangun Metadata Statistik Sektoral			Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Auman Laporan relaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keamanan Informasi	Dokumen Kebijakan Pengamanan Informasi		Hasil: Peningkatan Komitmen, efektifitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengamanan informasi	pengamanan informasi	informasi	Tingkat kematangan keamanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelathan Statistik Sektoral dari BPS	Dokumen Kebijakan Statistik Sektoral	Jum lah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen Metadata Statistik Sektoral	Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat	Peserta Bimbingan Teknis
200	n/a	Laporan	Dok	n/a						n/a	n/a	n/a	n/a	Orang	0	Orang
	Jenis 3		Dok -	D <sub>0</sub> k		%	% 7	75 =	Level							
	27,366,650		42,930,820	116,375,300			100,07,7,70	196 673 770	186,672,770							
Laporan		Laporan				% 75	% 3	j =	Level					Orang	40	
47,927,000	47 937 060	24,999,620	u.				100,020,000	138 026 540	138,926,540						45,523,300	
Laporan	*	Laporan				% 8	% 8	80 <del>=</del>	Level	31 Orang		Dok 1		Orang	40	
1,047,000	47 927 060	25,000,000	4				100,021,000	438 927 060	138,927,060	15,000,000		60,000,000			60,000,000	
Laporan	Jenis	2 Laporan	D <sub>k</sub>	Dok -		% 80	* 8	80 ∓	Level	31 Orang		Dok 4		Orang	80	
	123,220,770		92,930,440	116,375,300	116035000			464 526 370	464,526,370	15,000,000		60,000,000			105,523,300	
9	Bid Kips	Bid. XTV	Bid. KIPS	0 2 7	Dia King					Bid. KIPS	Bid. KIPS	Bid. KIPS	Bid KIPS		Bid. KIPS	Bid. KIPS
6	ig, Pandan	ig. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	g rangan	To Donato					Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membaiong, Selat Nasik	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		Tg. Pandan	Tg. Pandan

	27,230,688,913	20.00	9,315,294,000	0	9,016,678,420	ω	8,898,716,493					JUMLAH	
Bd.	131,999,860 Bid. KIPS Tg. Pandan, Sijuk Badau, Membalong, Selat Nasik	31 Perangka t Daerah	66,000,000 31 Perang	0 31 Perangk at	65,999,860	31 Perangk at Daerah		n <i>l</i> a	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				
Bid. KIPS Tg. Pandan, Sjuk, Badau, Membalong, Selat Nasik								n/a	Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 21 02 2.01 04		

#### BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Perangkat daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	,	Target Ca	paian Seti	iap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	RPJMD
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	-	3.26	3.4	3.6	3.8	3.8
2	Persentase Pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	n/a	81.72%	86.62%	87%	90%	95%	95%
3	Kelancaran Diseminasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah	80%	100%					
4	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	25%	50%	65%	80%	100%	100%	100%
5	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Terlayani	Belum tersedia		90%				
6	Persentase Diseminasi informasi kebijakan yang didesiminasikan	40%	40%	60%	80%	100%	100%	100%
7	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	70%	75%					
8	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Belum tersedia		70%	80%	90%	90%	90%
9	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	20%	30%					
10	Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi	60%	60%	70%				
11	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II	Level I	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II+

### **BAB VIII**

# PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung. Selain itu Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk bersama-sama mencapai visi dan misi kabupaten belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sikap mental, tekad, semangat, komitmen, ketaatan dan disiplin aparatur dan dukungan masyarakat dan kalangan usaha.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ini akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam rangka menyusun Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023.

Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, April 2022

Bupati Belitung

H. SAHANI SALEH, S.Sos

